

LAPORAN KINERJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2023



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2023.

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun-tahun

selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pamekasan, 29 Februari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN



MUHARRAM, ST

NIP. 19680330 199803 1 006

Pembina Utama Muda

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PAMEKASAN** untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen **DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PAMEKASAN**.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pamekasan, 29 Februari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN


MUHARRAM, ST

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Pengukuran Kinerja	24
B. Analisis Capaian Kinerja	25
C. Capaian Kinerja Lain	39
D. Realisasi Anggaran	40
E. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
BAB IV PENUTUP	57
LAMPIRAN	59
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	59
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	64
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	10
Tabel 2.2	: Indikator Kinerja Utama (IKU)	12
Tabel 2.3	: Rencana Kinerja Tahun 2023	15
Tabel 2.4	: Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebelum dan sesudah perubahan	17
Tabel 2.5	: Program dan Kegiatan Tahun 2023	19
Tabel 3.8	: Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	40
Tabel 3.9	: Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	46
Tabel 3.10	: Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan kegiatan	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan Perangkat Daerah, capaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- Pemberian rekomendasi perijinan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan.

Gambar 1.1.



Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukim

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan Perangkat Daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis Perangkat Daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan cakupan layanan air bersih/air minum layak bagi masyarakat miskin dan daerah rawan kekeringan di pedesaan;
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang digunakan rumah tangga belum memiliki akses aman;
3. Akses masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah permukiman masih Kurang, terutama di daerah pedesaan;
4. Kurang berfungsinya saluran drainase sebagai pemutus air hujan, menyebabkan masih adanya genangan air di beberapa ruas jalan dalam kota;
5. Kurangnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis pedesaan (kawasan agropolitan, minapolitan, rupanandur, kampung batik dan bagi rasa);
6. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
7. Belum optimalnya penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
8. Penyediaan PSU di perumahan dan permukiman masih rendah.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2018-2023, Arah

Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan upaya pengurangan luasan permukiman kumuh serta peningkatan Kualitas kawasan Permukiman;
2. Peningkatan kualitas rumah layak huni bagi MBR;
3. Pembangunan, Peningkatan dan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perdesaan dan perkotaan;
4. Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik skala permukiman baik individual maupun komunal di perdesaan;
5. Pembangunan Sistem Drainase lingkungan di lingkungan perdesaan.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
7. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 93 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Pamekasan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Pamekasan dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten yang BAJRA RAJJA tor PARJUGHA.

Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 adalah:

**Pamekasan Sejahtera Dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan
Berdasarkan Nilai-Nilai Agama**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Penguatan kualitas sumber daya manusia
2. Perekonomian inklusif yang bertumpu pada sektor pertanian dan di dukung percepatan pembangunan sektor industri manufaktur perdagangan dan sektor potensial lainnya

3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Berkualitas dan Merata
5. Pengelolaan Potensi Sosial, Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengacu pada Misi ke-4, yaitu :

‘ Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Berkualitas dan Merata ‘

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan dan 3 sasaran strategis.

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Berikut indikator dan target Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Pamekasan

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	3		4	5	6	7	8	9
1	1.1	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	33,33%	56,72%	67,83%	78,94%	90,06%
			Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	5,00%	10,00%	20,00%	60,00%	80,00%
2	2.1	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95,33%	97,17%	97,37%	97,57%	97,77%
			Prosentase penurunan luas kawasan kumuh	97,48%	84,03%	63,03%	42,02%	21,01%
			Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	53,53%	54,53%	55,53%	56,53%	57,53%
			Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	63,65%	64,65%	65,65%	66,65%	67,65 %
S S	1.3	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A	A	A	A	AA

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman *periode 2018 - 2023*

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SAT .	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	1.1	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	%	Penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung	(Jumlah bangunan gedung yang ber - IMB / Jumlah seluruh bangunan gedung) X 100 %	Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.2	Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas/ Laik Fungsi	%	Suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif (status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan IMB) dan persyaratan teknis (persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung) sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.	(Jumlah Gedung Penyelenggaraan Pemerintah yang Layak Fungsi / Jumlah Gedung Penyelenggaraan Pemerintah) X 100%	Dokumen Pendataan Bangunan Gedung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SAT .	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
2	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	2.1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya	$(\text{Jumlah Rumah Layak Huni} / \text{Jumlah Seluruh Rumah Kab. Pamekasan}) \times 100\%$	Data BPS Kabupaten Pamekasan Tahun 2016
		2.2	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	%	Perbandingan jumlah luasan permukiman kumuh yang menurun apabila dibandingkan dengan jumlah luasan daerah Kabupaten Pamekasan yang dinyatakan dalam persen (%)	$(\text{Luas Lingkungan Permukiman Kumuh} / \text{Luas Wilayah}) \times 100\%$	SK Bupati tentang Kawasan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
		2.3	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase	$(\text{Jumlah rumah tangga dengan air minum layak} / \text{Jumlah seluruh rumah tangga}) \times 100\%$	Data Rencana Induk SPAM (RISPAM) Kabupaten Pamekasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SAT .	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		2.4	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	%	Perbandingan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak (dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase	(Jumlah rumah tangga dengan layanan sanitasi layak / Jumlah seluruh rumah tangga) X 100 %	Data Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Pamekasan
3	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	3.1	Nilai SAKIP	Poin	Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.	Penilaian SAKIP 2023 : - Perencanaan Kinerja 30% - Pengukuran Kinerja 30% - Pelaporan Kinerja 15% - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25%	Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2023
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman.		Rasio Permukiman Layak Huni	%	60,09
		1.1	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart		
			Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	%	90,06
			Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	%	80,00
		1.2	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat		
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	97,77
			Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	%	21,01
			Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	57,53

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5	6
				Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	%	67,65
		1.3	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Poin	85

Sumber : Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2023 mengalami 2 kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah

disusun dan ditandatangani bulan Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada bulan November 2023.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.4

Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 sebelum dan sesudah perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	1.1	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	90,06%
		1.2	Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	80,00%
2	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	2.1	Cakupan ketersediaan rumah layak hun	97,77%
		2.2	Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	21,01%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
		2.3	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	57,53%
		2.4	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	67,65%
4	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	4.1	Nilai SAKIP	AA

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 mengalami perubahan karena adanya perubahan anggaran namun tidak merubah target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2023. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 setelah revisi yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2023 ini.

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

Tabel 2.5

**Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Tahun 2023**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	80%	Rp35.817.794.150
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	11 SPAM	Rp35.817.794.150
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan	67,65%	Rp11.527.100.700
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	11 SPALD	Rp11.527.100.700
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan	52,25%	Rp8.833.174.087
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan	3 Sistem Drainase	Rp8.833.174.087
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman yang Dikembangkan	80%	Rp96.818.720.403

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang diselenggarakan	3 Infrastruktur	Rp96.818.720.403
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang tertata	30%	Rp5.761.205.661
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	2 Penyelenggaraan	Rp5.761.205.661
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	40%	Rp4.262.407.400
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan	1 Penataan Bangunan	Rp4.262.407.400
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi	24%	Rp400.000.000
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	2 Penyelenggaraan	Rp300.000.000
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi	57,14%	Rp100.000.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	Rp115.355.067
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	4 Perencanaan	Rp115.355.067
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	Rp3.286.832.680
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit Kerja	Rp3.286.832.680
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	100%	Rp1.752.956.873
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	5 Sarana	Rp333.871.969
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	1 Prasarana	Rp335.903.000
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	3 Jasa Penunjang	Rp741.732.904

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	3 Pemeliharaan	Rp341.449.000
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Rumah Layak Huni	96,27%	Rp1.225.000.000
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	100%	Rp1.225.000.000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	94%	Rp2.104.920.000
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	100%	Rp400.000.000
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	1 Kawasan	Rp650.000.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	2 Peningkatan Kualitas	Rp1.054.920.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	96,27%	Rp6.107.500.000
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan	1 Perbaikan RTLH	Rp6.107.500.000
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang ditingkatkan	100%	Rp72.500.300
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	77,77%	Rp72.500.300

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan merupakan kinerja tahun terakhir periode Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2023. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 92,79% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut :

No .	Indikator	Target 2023	Realisasi	Capaian (%)
Tujuan 1 : Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman.				
1.	Rasio Permukiman layak huni	60,09%	55,76%	92,79%
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart				
1.	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	90,06%	105,37%	117,00%
	Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	80,00%	56,43%	70,54%
Sasaran 2 Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat				
1.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,77%	94,79%	96,95%
2.	Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	21,01%	19,96%	95,06%
3.	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	57,53%	48,31%	83,97%

2.	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	67,65%	59,35%	87,74%
Sasaran 2 Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah				
1.	Nilai SAKIP	85	80,45	94,65%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 5 target: dan

B. Analisis Capaian Kinerja

Tujuan 1 Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman

Capaian indikator Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut :

Indikator	Target Renstra 2023	Realisasi Renstra 2023	Capaian (%)
Rasio Permukiman Layak Huni	60,09%	55,76%	92,79%

Permukiman layak huni merupakan permukiman yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan yang sehat dan aman yang didukung (PSU) dengan penataan sesuai standar dan tata ruang yang berlaku serta menjamin kesehatan masyarakat. Permukiman layak huni yang terdiri dari rumah yang layak huni, akses air bersih yang layak, akses sanitasi yang layak serta akses jalan lingkungan yang baik merupakan infrastruktur dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang dapat memberikan kualitas hidup yang baik bagi penghuninya dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Capaian kinerja pada indikator tujuan ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana capaian

kinerja tahun 2023 yaitu 92,79% dan capaian kinerja tahun 2022 yaitu sebesar 88,24%. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor pendorong seperti kebijakan dan regulasi yang mendukung pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan dana yang memadai untuk proyek-proyek perumahan dan infrastruktur dasar, peningkatan akses dan kualitas air bersih serta sistem sanitasi, dan juga keterlibatan masyarakat dalam program-program perbaikan lingkungan dan perumahan serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Namun demikian masih juga ditemukan beberapa hal yang menjadi faktor penghambat keberhasilan seperti sumber daya air yang terbatas, keterbatasan lahan yang layak untuk pembangunan permukiman, keterbatasan dana, dan masih ditemukannya perilaku yang tidak mendukung kebersihan dan perawatan lingkungan. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan meningkatkan kolaborasi dengan BUMD, meningkatkan koordinasi antar instansi yang terkait, mengedukasi dan melibatkan masyarakat melalui kelompok swadaya masyarakat, optimalisasi penggunaan dana secara efisien. Berikut adalah

realisasi kinerja dan anggaran rasio permukiman layak huni pada tiga tahun terakhir :

INDIKATOR	TARGET			REALISASI			CAPAIAN (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Rasio Permukiman Layak Huni	59,73%	59,95%	60,09%	52,04%	52,90%	55,76%	87,13%	88,24%	92,79%

INDIKATOR	PAGU ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			CAPAIAN (%)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Rasio Permukiman Layak Huni	Rp 207.038.154.050,00	Rp 226.178.561.006,00	Rp 178.085.467.321,00	Rp 182.938.402.598,06	Rp 173.466.565.819,00	Rp 158.782.057.975,00	88,36%	76,69%	89,16%

Berdasarkan dua tabel diatas dapat dibandingkan capaian kinerja dan capaian anggarannya dimana pada tahun 2021 bisa dikatakan tingkat efisiensi nya

kurang dibandingkan tahun 2022 dan tahun 2023, hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi atau kebijakan, kendala teknis dan alam yang tidak bisa di prediksi sebelumnya sehingga memerlukan penyesuaian dan peningkatan biaya, dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang terlatih. Sedangkan pada tahun 2022 dan tahun 2023 capaian kinerjanya lebih besar daripada capaian keuangannya sehingga terjadi efisiensi operasional dan manajemen pengelolaan kinerja dan anggaran yang baik dan efektif, serta didukung juga oleh kapasitas sumber daya manusianya yang terlatih dan berpengalaman sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien.

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Sesuai Standart

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Sesuai Standar” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1. Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	90,06%	105,37%	117,00%
1.2. Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/ laik fungsi	80,00%	56,43%	70,54%

1.1. Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung

Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung. Kegiatan yang dilaksanakan pada indicator sasaran diatas yaitu terkait penyelenggaraan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) namun dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai pemberi rekomendasi untuk kemudian dilanjutkan ke Dinas PMPTSP yang akan menerbitkan dokumen PBG dan SLF tadi. Capaian kinerja pada indicator sasaran prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung bisa dikatakan masuk dalam kategori berhasil karena capaian kinerjanya melebihi 100% dari target kinerja

200 Dokumen PBG berhasil di realisasikan sebanyak 234 dokumen PBG yang sudah terbit di tahun 2023. Hal ini disebabkan karena antusias pemohon untuk mengurus PBG dan SLF dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan bangunan yang tinggi. Capaian kinerja sasaran pada tahun 2023 yaitu sebesar 117%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dimana capaian kinerjanya yaitu sebesar 120,79%. Realisasi kinerja pada tahun 2022 juga lebih besar yaitu sejumlah 244 dokumen PBG/SLF yang sudah diterbitkan dari target 200 dokumen. Adapun realisasi kinerja jumlah PBG/SLF yang sudah terbit pada 3 tahun terakhir yaitu 594 dokumen pada tahun 2020, 403 dokumen pada tahun 2021 dan 244 dokumen pada tahun 2022. Selain capaian kinerjanya yang tinggi, indicator sasaran kinerja ini memiliki tingkat efisiensi yang tinggi juga karena capaian kinerjanya lebih besar daripada capaian anggarannya dimana capaian anggarannya yaitu sebesar 44,25%, sehingga tingkat efisiensinya sebesar 72,75%. Kendati demikian masih ada kendala yang masih ditemukan seperti kurang pahamnya pemohon terhadap penggunaan aplikasi SIMBG sehingga mengakibatkan lamanya proses permohonan. Solusinya pemohon dapat berkonsultasi dengan petugas di Mall Pelayanan Publik yang sudah ditugaskan khusus melayani permohonan PBG. Berikut adalah dokumentasi dokumen berita acara PBG yang di rekomendasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan dokumen PBG yang sudah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

 BERITA ACARA PENILAIAN KONSULTASI NOMOR : 001 / 265 / BA.TPT / 432.304 / 2023 Berdasarkan hasil konsultasi kelengkapan dokumen standar teknis, pada: Nama Pemohon : AGUS SUHARJO Bangunan Gedung : Fungsi Usaha Lokasi di : Dusun Seccang Kel. Plakpak Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur Nomor registrasi : SLF-352807-17102023-01 Mempertimbangkan bahwa : - Berdasarkan Surat Pemyataan dari Pemohon dan hasil Pemeriksaan dari Pengkaji Teknis, bangunan yang diajukan oleh pemohon secara arsitektur, struktur dan utilitas sudah dinyatakan Laki Fungsi oleh Pemohon berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Pengkaji Teknis; - Berdasarkan hasil survey ke lokasi, bangunan sesuai dengan permohonan; Memutuskan untuk : Memerintahkan penerbitan PBG dan SLF Ditentukan hasil penilaian konsultasi, Atas kefasahannya disampaikan terimakasih. Pamekasan, 23 November 2023  AKM. MUSTHOFA ANSHORY, ST Tim Penilai Teknis	 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG Nomor : SK-PBG-352807-01122023-001 Menbaca Pemohonan Penetapan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG-352807-01122023-001 Tanggal 01-12-2023 Nama pemohon/pemilik : AGUS SUHARJO Bangunan gedung : GUDANG PR. 33 KINGDOM Alamat : TONDOMULO KEL. TONDOMULO KEC. KEDUNGADEN, KailDesa Tandamulu, Kec. Kedungadèn, Kab. Baganegara, Prov. Jawa Timur Untuk : Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Usaha Klasifikasi bangunan Gedung : Bangunan Sederhana Nama bangunan gedung : GUDANG PR. 33 KINGDOM Luas bangunan Gedung : 435.74 Rak atas tanah : 046 Luas tanah : 695.00 meter persegi Pemilik Tanah : Royhan Akbar Tersurat di : DUSUN SECCANG KEL. PLAKPAK KEC. PEGANTENAN, KailDesa Plak Pak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (memcatat/memotif), mengaji, dan menilai investasi serta menyajikn dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini diuraikan, maka terhadap permohonan penunjukan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini. Mengingat - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lamban Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134) - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lamban Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25) - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis TPA Gedung Nomor 001 / 265 / BA.TPT / 432.304 / 2023 Tanggal 23 November 2023 (untuk Bangunan Gedung Kependidikan Umum)	Memutuskan Menetapkan - Penunjukan Bangunan Gedung kepada: Nama Pemohon : AGUS SUHARJO Atas nama pemilik : AGUS SUHARJO Bangunan gedung : GUDANG PR. 33 KINGDOM Alamat : DUSUN SECCANG KEL. PLAKPAK KEC. PEGANTENAN, KailDesa Plak Pak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur Bangunan Eksisting sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi Lampiran b dan rencana teknik, metode gambar arsitektur, gambar konstruksi bangunan gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrikal), pembebasan dan pencatatan PBG Lampiran c, dan penghitungan besarnya retribusi PBG dalam Lampiran d Keputusan ini. - Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran d Keputusan ini sebesar: a. Retribusi Penunjukan Bangunan Gedung : Rp. 2.417.800 (Dua juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) *) untuk penunjukan PBG atas pemilikan pemilik. - Lampiran Keputusan ini menetapkan satu keadaan yang tidak terpenuhi dari Keputusan ini. - Hak-hak yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian; - Selain Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.  DITETAPKAN DI : PAMEKASAN PADA TANGGAL : 01-12-2023 ATAS NAMA BUPATI PAMEKASAN REFALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAMEKASAN Drs. TAUFIKURACHMAN, M.Si NIP. : 19600903 195031 1 008
--	--	---

fungsi.

Suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif (status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan IMB) dan persyaratan teknis (persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung) sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan. Indikator sasaran ini didukung oleh beberapa program seperti program penataan bangunan gedung, program penataan bangunan dan lingkungan serta program pengembangan jasa konstruksi. Capaian kinerja pada indikator sasaran ini bisa dikatakan cukup baik dengan capaian kinerja 70,54% karena ada kegiatan yang targetnya tidak tercapai seperti pada kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi, dari target 150 Orang hanya terealisasi 59 Orang. Hal ini mempengaruhi hasil capaian kinerja dari indikator sasaran tersebut karena program jasa konstruksi termasuk salah satu penunjang indikator sasaran Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laiik fungsi. Perbandingan capaian kinerja tahun ini mengalami penurunan dimana capaian kinerjanya tahun sebelumnya yaitu 94%. Solusi ke depannya kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi akan diselenggarakan lebih awal dengan menyebarkan informasi berupa brosur terkait pelatihan tenaga terampil konstruksi melalui Asosiasi (GAPEKSI) serta menambah anggaran untuk skema sertifikasi dan jumlah peserta dari jenjang 4 (tenaga kerja konstruksi) ke jenjang 5 (Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha) dan jenjang 6 (Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha).



Dokumentasi pelatihan dan uji sertifikasi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi Jenjang 4

Pada indikator sasaran ini capaian anggaran yang terserap yaitu sebesar 93,57% dimana masih lebih besar daripada capaian kinerjanya yang sebesar 70,54%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pada indikator sasaran ini masih tergolong rendah yaitu -23,03%. Strategi ke depannya, penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi ini akan dilaksanakan lebih awal dan target jumlah pesertanya akan disesuaikan lagi dengan biaya uji sertifikasi yang relative naik.

Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Sehat

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang Sehat” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
2.1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,77%	94,79%	96,95%
2.2 Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	21,01%	19,96%	95,00%
2.3 Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	57,53%	48,31%	83,97%
2.4 Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	67,65%	59,35%	87,73%

2.1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

indikator sasaran ini merupakan cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuninya. Sasaran dari kegiatan ketersediaan rumah layak huni adalah MBR (Masyarakat Berpenghasilan rendah). Pedoman terkait penyelenggaraan kegiatan rumah tidak layak huni sudah diatur dalam

Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020. Program yang mendukung capaian indikator sasaran ini adalah Program Pengembangan Perumahan dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Total rumah yang telah dilaksanakan perbaikan terhadap rumah yang tidak layak huni tahun 2023 yaitu sejumlah 483 unit rumah, sehingga rumah layak huni semakin bertambah dari yang sebelumnya sejumlah 214.210 rumah menjadi 214.695 rumah yang layak huni dari total rumah kabupaten pamekasan 221.322 unit. Jadi cakupan ketersediaan rumah layak huni yang dicapai yaitu 97,01%. Realisasi kinerja pada tiga tahun terakhir capaiannya semakin meningkat dimana pada tahun 2020 cakupan rumah layak huninya 95,62%, tahun 2021 cakupan RLHnya 96,00%, dan tahun 2022 cakupan RLHnya sebesar 96,79%. Seharusnya kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini bisa mencapai 100% apabila tidak ada CPB (Calon Penerima Bantuan) yang mundur waktu itu. Ada 4 orang yang mundur dengan alasan tidak mampu berswadaya. Dari 485 rumah yang telah diperbaiki tersebut ada kegiatan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Perumahan terkait Bencana yaitu pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota. Untuk SPM ini telah dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sejumlah 35 unit rumah sesuai kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2023, sehingga capaian kinerja untuk SPM Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu 94,59%. Pada indikator sasaran cakupan ketersediaan rumah layak huni memiliki tingkat efisiensi yang baik karena capaian kinerjanya lebih besar daripada capaian anggarannya yang sebesar 89,93%, sehingga tingkat efisiensi pada indikator sasaran ini yaitu 7,02%





2.2. Prosentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh

Permukiman kumuh merupakan kawasan dengan kondisi lingkungan permukiman yang mengalami penurunan kualitas lingkungan secara fisik, sosial, ekonomi dan budaya. Maka peningkatan kualitas lingkungan dari 0% menjadi 50% dan 100%.

Dokumentasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Kabupaten Pamekasan. Peningkatan kualitas lingkungan yang dilaksanakan yaitu melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis dan penyusunan dokumen RP2KPKPK (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh) sebagai dokumen perencanaan teknisnya. Kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur ini berupa pembangunan jalan lingkungan. Capaian kinerja pada indikator sasaran ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dimana tahun 2022 capaian kinerjanya 71,98% dan pada tahun 2023 capaian kinerjanya 95,00%. Capaian kinerja penurunan luasan kawasan kumuh pada 3 tahun terakhir rata-rata 90% dimana pada tahun 2020 tercapai 97,02%, tahun 2021 tercapai 98,53% dan tahun 2022 tercapai 71,98%. Penurunan capaian kinerja di tahun 2022 disebabkan adanya perubahan anggaran kegiatan (PAK) yang mana waktu pengesahannya mendekati akhir tahun anggaran sehingga kegiatan tersebut tidak terlaksana.

sehingga mempengaruhi capaian kinerjanya. Untuk tingkat efisiensi pada indicator sasaran ini sebesar 5,07% dimana capaian anggarannya masih lebih rendah daripada capaian kinerjanya yaitu sebesar 89,93%.

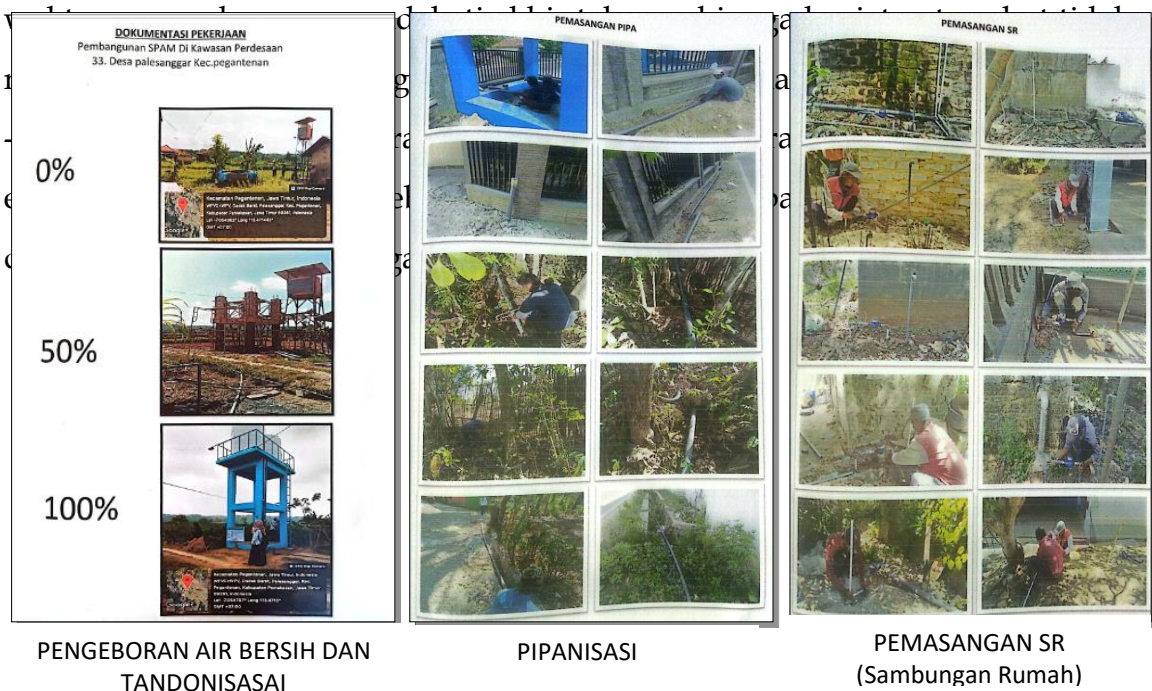


2.3. Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan

Indikator sasaran diatas merupakan perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang berkualitas (layak) dengan seluruh rumah tangga seluruhnya. Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum menjadi penunjang indicator sasaran ini dimana pada tahun 2023 ini sudah terealisasi 2.414 SR dari target 2.875 SR sehingga capaian kinerja yang dihasilkan yaitu 83,97%. Pengukuran capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya cenderung naik karena capaian

1] Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Bagi Rasa Dusun Batas Timur Desa igan
(Ragang Kecamatan Waru igan
rincian capaian kinerja pada tahun 2020 yaitu 94,87%, pada tahun 2021 yaitu 94,63% dan pada tahun 2022 yaitu 77,78%. Sama halnya dengan indicator

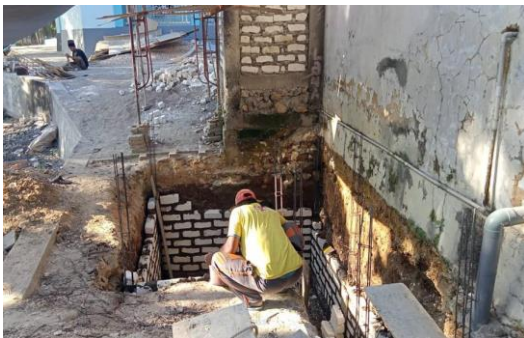
sasaran penurunan luasan kawasan kumuh diatas dimana penurunan capaian kinerja disebabkan adanya perubahan anggaran kegiatan (PAK) yang mana



2.4. Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan

Indikator sasaran ini merupakan suatu perbandingan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak (dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)) dengan rumah tangga seluruhnya. Indikator ini ditunjang dengan program pengelolaan dan pengembangan system air limbah, dan program pengelolaan dan pengembangan system drainase. Pembangunan tangki septik individual di permukiman perdesaan dan tangki septik komunal di lingkungan pondok pesantren pada program air limbah sudah terlaksana semua, namun pada program drainase belum terealisasi

semua dari total target panjang saluran drainase 9.801 meter hanya terealisasi 8.460,74 meter. Hal ini karena tidak ada kejelasan lokasi dari pihak aspiratornya dan ketika di survey ke lokasi ternyata system drainasenya masih berfungsi dengan baik, sehingga dari 65 lokasi hanya dikerjakan 60 lokasi. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi capaian kinerja indikator sasaran. Adapun capaian kinerja pada tahun 2023 yaitu 87,73%, apabila dibandingkan capaian kinerjanya dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 55,74% maka capaian tahun 2023 cenderung naik. Kenaikan capaian kinerja ini bisa dikatakan suatu keberhasilan pada indikator sasaran tersebut, hal ini disebabkan karena perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik serta SDM yang memiliki kompetensi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder. Capaian kinerja pada 3 tahun terakhir secara rata-rata bisa dikatakan cukup baik yaitu sekitar 82,08% dimana rincian capaiannya pada tahun 2020 yaitu sebesar 95,28%, pada tahun 2021 capaian kinerjanya sebesar 95,23% dan pada tahun 2022 capaian kinerjanya menurun menjadi 55,74%. Penurunan ini disebabkan karena perubahan anggaran kegiatan yang mendekati akhir tahun serta target lokasi kegiatan yang awalnya 8 lokasi menjadi 35 lokasi. Solusi kedepannya untuk perubahan anggaran kegiatan yang tidak mungkin terlaksana di tahun berjalan



tidak harus merubah target, jadi hanya anggaran saja yang berubah. Indikator sasaran ini memiliki tingkat efisiensi sebesar -2,34% yang mana menunjukkan kurang efektif dan efisien meskipun angkanya kecil. Hasil capaian kinerja (87,73%) yang lebih rendah daripada hasil capaian anggarannya (90,07%) menunjukkan ketidakefektifan kegiatan tersebut.



Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Sesuai Star” adalah sebagai berikut:

Dokumentasi Pembangunan Tangki Septik Individual (Bilik MCK, Kloset, dan tangki septic)			
	2022	2023	Capaian (%)
3.1 Nilai SAKIP	85	80,45	94,65%

3.1 Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nilai sistem akuntabilitas kinerja menggambarkan sudah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya. Nilai tersebut diperoleh

melalui Evaluasi Implementasi SAKIP internal Kabupaten Pamekasan yang dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan kebijakan tersebut, hasil penilaian evaluasi SAKIP di instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut:

No	Nilai	Predikat	Interpretasi
1	>90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
2	>80 – 90	A	Memuaskan
3	>70 – 80	BB	Sangat Baik
4	>60 – 70	B	Baik
5	>50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
6	>30 – 50	C	Kurang
7	>0 – 30	D	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel diatas, Nilai AKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan nilai 80,45 berada pada predikat A dengan interpretasi Memuaskan, ditandai dengan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran telah dilakukan sampai ke level 4 atau pengawas/Subkoordinator. Adapun rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	25,50
2	Pengukuran Kinerja	30	23,40
3	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,25
NILAI HASIL EVALUASI		100	80,45
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA			A

Adapun Perbandingan Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

**Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Tahun 2021 s.d 2023**

2021	2022	2023
83,69	83,95	80,45

Terdapat penurunan realisasi pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, Hal ini disebabkan karena :

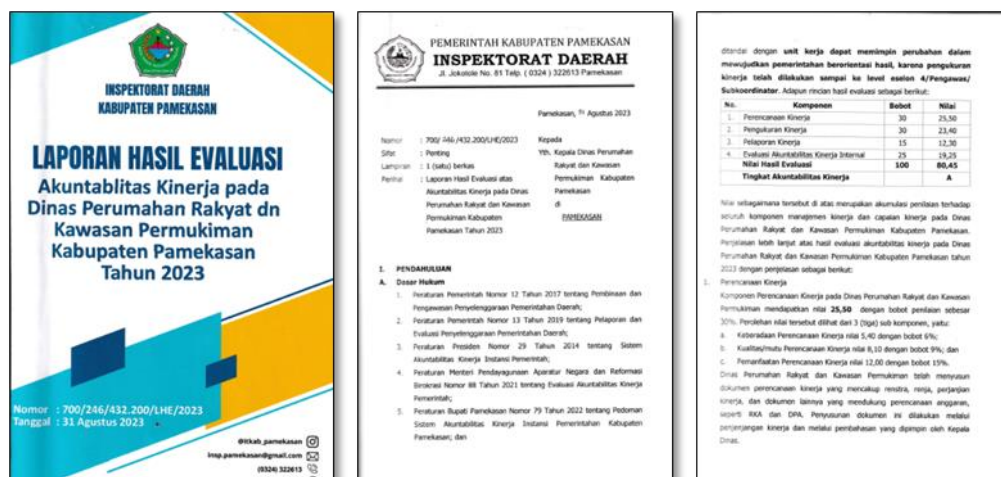
1. Rencana aksi yang telah ditetapkan memuat aktivitas yang kurang spesifik
2. Definisi operasional atas indicator kinerja belum ditetapkan
3. Belum dibuatkan SOP untuk pengukuran kinerja
4. Pemantauan atas pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang namun belum sepenuhnya memuat kriteria keberhasilan dan rekomendasi perbaikan
5. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dan anggaran dalam mencapai kinerja, namun masih belum ada inefisiensi atas penggunaan anggaran
6. Penetapan target yang tidak realistis karena target tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022
7. Laporan kinerja masih belum memuat informasi perbaikan ke depan yang akan dilakukan untuk perencanaan kinerja

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah :

1. Mengikuti kegiatan pendampingan penyusunan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berkala ke OPD pengampu yang berkaitan dengan SAKIP
3. Memenuhi seluruh kebutuhan dokumen SAKIP dengan memperhatikan aspek kualitas

Beberapa upaya yang ditargetkan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Nilai SAKIP 2023, diantaranya :

1. Melakukan asistensi dan pendampingan kepada seluruh bagian di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP
2. Melakukan reviu terhadap dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3. Melakukan evaluasi mandiri internal
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Implementasi SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



C. Capaian Kinerja Lain

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan pernah menerima penghargaan dengan kategori Lembaga yaitu Kepala Dinas Inovatif Bidang Pembangunan dan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dalam acara AJP (Aliansi Jurnalis Pamekasan) Awards 2023 15th Anniversary and Grand Reunion yang digelar di Hotel Azana Pamekasan. Penghargaan tersebut diberikan kepada lembaga media atau organisasi yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam menyebarkan informasi yang relevan, mendukung kebebasan pers dan mendorong praktik jurnanisme yang

berkualitas. Melalui dedikasi lembaga atau organisasi tersebut mampu menjadi pelopor dalam melaporkan berita-berita penting, memperjuangkan keadilan serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi di masyarakat Pamekasan. Diharapkan lembaga tersebut terus menjadi teladan bagi lembaga



media lainnya dan menjadi sumber inspirasi bagi para jurnalis di Kabupaten Pamekasan khususnya.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	35.817.794.150,00	30.474.723.378,00	85,08%
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan			
	PENGHARGAAN AJP AWARDS 2023 KATEGORI LEMBAGA			85,08%
	Kabupaten/Kota			
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	300.000.000,00	192.995.000,00	64,33%

1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	669.000.000,00	549.525.825,00	82,14%
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	23.843.484.250,00	20.876.739.253,00	87,56%
NO	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	500.000.000,00	481.552.525,00	96,31%
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.374.197.000,00	2.197.214.288,00	65,12%
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	500.000.000,00	322.460.220,00	64,49%
1.03.03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	563.000.000,00	328.688.960,00	58,38%
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	860.410.900,00	845.259.000,00	98,24%
1.03.03.2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	100.000.000,00	87.123.197,00	87,12%
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.602.978.000,00	4.173.106.950,00	90,66%
1.03.03.2.01.20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	504.724.000,00	420.058.160,00	83,23%
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	11.527.100.700,00	10.215.950.300,00	88,63%
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.527.100.700,00	10.215.950.300,00	88,63%
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	0,00	0,00%
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	760.033.700,00	707.279.400,00	93,06%
1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	100.000.000,00	90.881.250,00	90,88%
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	100.000.000,00	5.831.000,00	5,83%
1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	100.000.000,00	67.598.000,00	67,60%
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	100.000.000,00	0,00	0,00%
1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	200.000.000,00	0,00	0,00%
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	9.567.067.000,00	9.343.040.650,00	97,66%

	Terpusat Skala Permukiman			
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	100.000.000,00	0,00	0,00%
NO	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	200.000.000,00	1.320.000,00	0,66%
1.03.05.2.01.17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	50.000.000,00	0,00	0,00%
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	8.833.174.087,00	8.122.131.090,00	91,95%
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.833.174.087,00	8.122.131.090,00	91,95%
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	8.258.043.588,00	7.575.326.090,00	91,73%
1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	475.130.499,00	465.109.000,00	97,89%
1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	100.000.000,00	81.696.000,00	81,70%
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	96.818.720.403,00	87.128.317.570,00	89,99%
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	96.818.720.403,00	87.128.317.570,00	89,99%
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	96.618.720.403,00	87.128.317.570,00	90,18%
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00%
1.03.07.2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	5.761.205.661,00	5.408.825.955,00	93,88%
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	5.761.205.661,00	5.408.825.955,00	93,88%
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	300.000.000,00	132.758.500,00	44,25%

1.03.08.2.01 .02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5.461.205.661,00	5.276.067.455,00	96,61 %
NO	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	4.262.407.400,00	4.044.246.850,00	94,88%
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	4.262.407.400,00	4.044.246.850,00	94,88%
1.03.09.2.01 .03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	4.262.407.400,00	4.044.246.850,00	94,88 %
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	400.000.000,00	186.299.249,00	46,57%
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	300.000.000,00	133.001.749,00	44,33%
1.03.11.2.01 .04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	200.000.000,00	57.283.549,00	28,64 %
1.03.11.2.01 .06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	100.000.000,00	75.718.200,00	75,72 %
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100.000.000,00	53.297.500,00	53,30%
1.03.11.2.04 .02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100.000.000,00	53.297.500,00	53,30 %
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.155.144.620,00	4.735.744.433,00	91,86%
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.355.067,00	108.300.250,00	93,88%
1.04.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.740.000,00	84.472.500,00	94,13 %
1.04.01.2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.183.949,00	5.135.000,00	99,06 %
1.04.01.2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.800.000,00	4.734.500,00	98,64 %
1.04.01.2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.631.118,00	13.958.250,00	89,30 %
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.286.832.680,00	3.104.918.253,00	94,47%
1.04.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.286.832.680,00	3.104.918.253,00	94,47 %
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	333.871.969,00	319.636.781,00	95,74%
1.04.01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.760.000,00	4.311.550,00	74,85 %
1.04.01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.011.969,00	31.874.100,00	77,72 %
1.04.01.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	17.237.600,00	86,19 %

1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	39.977.850,00	99,94%
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227.100.000,00	226.235.681,00	99,62%
NO	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	335.903.000,00	310.253.848,00	92,36%
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	335.903.000,00	310.253.848,00	92,36%
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	741.732.904,00	596.888.637,00	80,47%
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	6.975.000,00	99,64%
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.832.904,00	82.609.641,00	74,54%
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	623.900.000,00	507.303.996,00	81,31%
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.449.000,00	295.746.664,00	86,62%
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.000.000,00	102.066.664,00	81,01%
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.049.000,00	49.028.000,00	97,96%
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	165.400.000,00	144.652.000,00	87,46%
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.225.000.000,00	612.500.000,00	50,00%
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.225.000.000,00	612.500.000,00	50,00%
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	875.000.000,00	350.000.000,00	40,00%
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	350.000.000,00	262.500.000,00	75,00%
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.104.920.000,00	1.747.319.150,00	83,01%
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	400.000.000,00	393.205.000,00	98,30%
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	400.000.000,00	393.205.000,00	98,30%
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	650.000.000,00	496.357.750,00	76,36%
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan	650.000.000,00	496.357.750,00	76,36%

	Permukiman Kumuh			
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.054.920.000,00	857.756.400,00	81,31%
NO	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	100.000.000,00	94.341.250,00	94,34%
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	954.920.000,00	763.415.150,00	79,95%
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	6.107.500.000,00	6.072.500.000,00	99,43%
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	6.107.500.000,00	6.072.500.000,00	99,43%
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	6.107.500.000,00	6.072.500.000,00	99,43%
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	72.500.300,00	33.500.000,00	46,21%
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	72.500.300,00	33.500.000,00	46,21%
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	72.500.300,00	33.500.000,00	46,21%

E. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	INDIKATOR	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
1	Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman.	Rasio Permukiman Layak Huni	60,09%	55,76%	92,79%	Rp178.085.467.321	Rp158.782.057.975	89,16%	3,63%
2	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	90,06%	105,37%	117,01%	Rp300.000.000	Rp132.758.500	44,25%	72,75%
		Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/ laik fungsi	80,00%	56,43%	70,54%	Rp10.196.113.361	Rp9.540.113.554	93,57%	-23,03%

No.	Tujuan/Sasaran	INDIKATOR	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian	
3	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,77%	94,79%	96,95%	Rp8.387.420.000	Rp7.542.756.400	89,93%	7,02%
		Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	21,01%	19,96%	95,00%	Rp97.868.720.403	Rp88.017.880.320	89,93%	5,07%
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	57,53%	48,31%	83,97%	Rp35.817.794.150	Rp30.474.723.378	85,08%	-1,11%
		Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	67,65%	59,35%	87,73%	Rp20.360.274.787	Rp18.338.081.390	90,07%	-2,34%

Uraian penjelasan tabel :

Tingkat efisiensi mengukur seberapa baik sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara tingkat efektifitas kinerja mengukur sejauh mana tujuan Dinas tercapai. Efisiensi dan efektifitas kinerja harus diperhatikan bersamaan untuk memastikan bahwa Dinas tidak hanya menggunakan sumber daya secara efisien, tetapi juga mencapai

hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan yaitu Meningkatnya Pemenuhan Dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman. Dari tabel diatas tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki tingkat efisiensi sebesar 3,63% dimana dengan capaian anggaran 89,16% mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 92,80%. Pada indikator sasarannya ada yang memiliki tingkat efisiensi dan ada juga yang kurang tingkat efisiensinya. Tingkat efisiensi yang paling besar ada pada indikator prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung yaitu sebesar 72,57% hal ini didorong oleh adanya kerjasama yang baik antar OPD terkait sehingga satu sama lain saling mendukung tertibnya penyelenggaraan bangunan gedung. Sedangkan indikator sasaran yang tingkat efisiensinya -23,03% yaitu Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi. Penyebab inefisiensi ini adalah penyelenggaraan kegiatan yang di mendekat akhir tahun dan target peserta yang telah ditetapkan tidak tercapai sepenuhnya, sedangkan penyerapan anggarannya sudah mencapai 93,57%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	80%	70,36%	87,96%	Rp35.817.794.150	Rp30.474.723.378	85,08%	2,87%
1.03.03 .2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	11 SPAM	11 SPAM	100,00%	Rp35.817.794.150	Rp30.474.723.378	85,08%	14,92%
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola dan Dikembangkan	67,65%	67,23%	99,37%	Rp11.527.100.700	Rp10.215.950.300	88,63%	10,75%

No.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	11 SPALD	5 SPALD	45,45%	Rp11.527.100.700	Rp10.215.950.300	88,63%	-43,17%
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan	52,25%	45,10%	86,33%	Rp8.833.174.087	Rp8.122.131.090	91,95%	-5,63%
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan	3 Sistem Drainase	3 Sistem Drainase	100,00%	Rp8.833.174.087	Rp8.122.131.090	91,95%	8,05%
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman yang Dikembangkan	80%	75,80%	94,75%	Rp96.818.720.403	Rp87.128.317.570	89,99%	4,75%
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis yang diselenggarakan	3 Infrastruktur	1 Infrastruktur	33,33%	Rp96.818.720.403	Rp87.128.317.570	89,99%	-56,66%

No.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang tertata	30%	34,24%	114,15%	Rp5.761.205.661	Rp5.408.825.955	93,88%	20,26%
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	2 Penyelenggaraan	2 Penyelenggaraan	100,00%	Rp5.761.205.661	Rp5.408.825.955	93,88%	6,12%
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	40%	40%	100,00%	Rp4.262.407.400	Rp4.044.246.850	94,88%	5,12%
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan	1 Penataan Bangunan	1 Penataan Bangunan	100,00%	Rp4.262.407.400	Rp4.044.246.850	94,88%	5,12%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi	24%	14,10%	58,75%	Rp400.000.000	Rp186.299.249	46,57%	12,18%

No.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1.03.11 .2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	2 Penyelenggaraan	2 Penyelenggaraan	100,00%	Rp300.000.000	Rp133.001.749	44,33%	55,67%
1.03.11 .2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi	57,14%	65,71%	115,00%	Rp100.000.000	Rp53.297.500	53,30%	61,70%
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	100%	100%	Rp115.355.067	Rp108.300.250	93,88%	6,12%
		Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100%	100%	100%	Rp3.286.832.680	Rp3.104.918.253	94,47%	5,53%
		Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	100%	92,24%	92,24%	Rp1.752.956.873	Rp1.522.525.930	86,85%	5,39%
1.04.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	4 Perencanaan	4 Perencanaan	100%	Rp115.355.067	Rp108.300.250	93,88%	6,12%

No.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1.04.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100%	Rp3.286.832.680	Rp3.104.918.253	94,47%	5,53%
1.04.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	5 Sarana	5 Sarana	100%	Rp333.871.969	Rp319.636.781	95,74%	4,26%
1.04.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	1 Prasarana	1 Prasarana	100%	Rp335.903.000	Rp310.253.848	92,36%	7,64%
1.04.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	3 Jasa Penunjang	3 Jasa Penunjang	100%	Rp741.732.904	Rp596.888.637	80,47%	19,53%
1.04.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	3 Pemeliharaan	3 Pemeliharaan	100%	Rp341.449.000	Rp295.746.664	86,62%	13,38%
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Rumah Layak Huni	96,27%	85,575	88,89%	Rp1.225.000.000	Rp612.500.000	50,00%	38,89%

No.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	100,00 %	77,78%	77,78%	Rp1.225.000.000	Rp612.500.000	50,00%	27,78%
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	94,00%	83,56%	88,89%	Rp2.104.920.000	Rp1.747.319.150	83,01%	5,88%
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	100,00 %	100%	100%	Rp400.000.000	Rp393.205.000	98,30%	1,70%
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	1 Kawasan	1 Kawasan	100%	Rp650.000.000	Rp496.357.750	76,36%	23,64%

No.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	2 Peningkatan Kualitas	2 Peningkatan Kualitas	100%	Rp1.054.920.000	Rp857.756.400	81,31%	18,69%
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	96,27%	95,72%	99,43%	Rp6.107.500.000	Rp6.072.500.000	99,43%	0,00%
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan	1 Perbaikan RTLH	1 Perbaikan RTLH	100,00%	Rp6.107.500.000	Rp6.072.500.000	99,43%	0,57%
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang ditingkatkan	100,00 %	0%	0%	Rp72.500.300	Rp33.500.000	46,21%	-46,21%
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	77,77%	0%	0%	Rp72.500.300	Rp33.500.000	46,21%	-46,21%

Uraian penjelasan tabel :

Pada tabel diatas dapat dianalisa bahwa rata-rata perbandingan pencapaian kinerja kegiatan dan anggarannya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki tingkat efisiensinya yang cukup tinggi. Pada sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, capaian kinerjanya sama dengan capaian anggarannya sehingga menghasilkan tingkat efisiensi 0%. Hal ini menunjukkan kinerja yang ideal dimana capaian kinerjanya berbanding lurus dengan capaian pada anggarannya.

Selain itu masih ada beberapa sub kegiatan yang masih memiliki tingkat inefisiensi namun masih berada pada rate -5% s/d -46,21% dimana hal ini akan menjadi bahan evaluasi dan monitoring kami untuk diupayakan kembali secara maksimal di tahun berikutnya agar kinerja seluruh kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bisa berjalan efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2023. Pembuatan LKJIP merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 dapat dinyatakan “berhasil” karena realisasinya 55,76% dari 60,09% target. Berikut capaian realisasi terhadap target indikator kinerja sasaran strategis dengan rincian :

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 5 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.178.085.467.321 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.158.782.057.975, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 capaian anggarannya sebesar 89,16% dan nilai efisiensi dan efektifitasnya sebesar 3,63%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 29 Februari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN



MUHARRAM, ST.

NIP. 19680330 199803 1 006

Pembina Utama Muda

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

JALAN JOKOTOLE NO. 143 PAMEKASAN, TELP. (0324) 611685
Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN**

NOMOR : 188/11.2/432.304/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PAMEKASAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten pamekasan Tentang Pembentukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah dirubah Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Pembentukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi yang diperlukan pada setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan;
- b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
- c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu :
 - Rencana Strategis (RENSTRA)
 - Rencana Kinerja (RENJA)
 - Rencana Aksi Kegiatan
 - Perjanjian Kinerja
 - Pengukuran Kinerja
 - Pengelolaan Data Kinerja
 - Pelaporan Kinerja

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Pamekasan

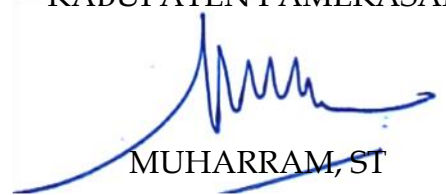
KETIGA : Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN



MUHARRAM, ST

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 188/ 11.2/ 432.304/ 2023
TANGGAL : 03 JANUARI 2023**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PAMEKASAN**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	Ketua	Muharram, ST.	Kepala Dinas
2	Sekretaris	Mohammad Fauzi, S.Sos, MMPub.	Sekretaris
3	Anggota	Didiek Roeswandi, ST.	Kepala Bidang Perumahan, Prasarana Sarana Utilitas Umum, dan Tata Bangunan
4	Anggota	Andriyani Daryanti, ST, MMT.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi, dan Air Bersih
5	Anggota	Dwi Budayana Eka Dewantara, ST.	Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan
6	Anggota	Akh. Musthofa Anshory, ST.	Kepala Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Tata Bangunan
7	Anggota	Nofinda Herlianawati, ST.	Kepala Seksi Perencanaan, Pengendalian Perumahan dan Bina Konstruksi
8	Anggota	Rr. Luciyana Emmy Hariyono, ST.	Kepala Seksi Pendataan, Perencanaan Kawasan Permukiman dan Sanitasi
9	Anggota	Lia Andriana, ST.MPWK.	Kepala Seksi Pemanfaatan, Pengendalian Kawasan Permukiman dan Air Bersih
10	Anggota	Raden Abdullah Arif, ST.	Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
11	Anggota	Nurhayati, SH.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
12	Anggota	Syarifah Hidayati, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum, dan Kepegawaian
13	Anggota	Akh. Zaidan Jauhari, S.Sos	Staf Perencanaan
14	Anggota	Bachtiar Efendi, SE	Staf Perencanaan
15	Anggota	Agus Hardyanto Kesuma, A.Md	Staf Perencanaan



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

JALAN JOKOTOLE NO.143 PAMEKASAN, TELP. (0324) 611685

Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 188/13.2/432.304/2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019-2023 PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PAMEKASAN**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN**

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan;
- b Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

MEMUTUSKAN :

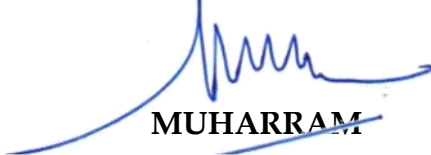
MENETAPKAN :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Dokumen Perencanaan dan Acuan, Tolak Ukur Penilaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan;
- KEDUA** : Isi dan Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan di ubah dan di perbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 03 Januari 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN**



MUHARRAM

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PAMEKASAN

Nomor : 188/13.2/432.304/2023
Tanggal : 03 Januari 2023
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 – 2023 Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSTANSI : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TUJUAN : Meningkatkan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman

TUGAS : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengelolaan, pembinaan dan pemberdayaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

FUNGSI : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
2. Penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya di bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;

3. Pengelolaan Bahan di bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
4. Pembinaan dan pengawasan di bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
5. Pemberdayaan dan pengembangan di bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
6. Pembinaan dan pengendalian unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya,

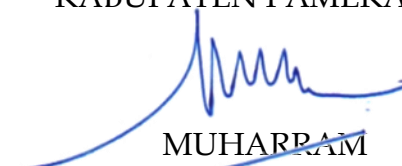
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	<u>Penjelasan :</u> Penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung. <u>Formulasi Perhitungan :</u> $\frac{\text{Jumlah bangunan ber - IMB}}{\text{Jumlah Bangunan}} \times 100 \%$	Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Bidang Perumahan, PSU, dan Tata Bangunan
	Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	<u>Penjelasan :</u> Penyelenggaraan bangunan gedung yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung. <u>Formulasi Perhitungan :</u> $\frac{\text{(Jumlah Gedung Penyelenggaraan Pemerintah yang Layak Fungsi)}}{\text{Jumlah Gedung Penyelenggaraan Pemerintah}} \times 100\%$	Dokumen Pendataan Bangunan Gedung	Bidang Perumahan, PSU, dan Tata Bangunan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	<u>Penjelasan :</u> cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. <u>Formulasi Perhitungan :</u> (Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah Seluruh Rumah Kab. Pamekasan) X 100%	Data BPS Kabupaten Pamekasan Tahun 2016	Bidang Perumahan, PSU, dan Tata Bangunan
	Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	<u>Penjelasan :</u> Perbandingan jumlah luasan permukiman kumuh yang menurun apabila dibandingkan dengan jumlah luasan daerah Kabupaten Pamekasan yang dinyatakan dalam persen (%) <u>Formulasi Perhitungan :</u> (Luas Lingkungan Permukiman Kumuh/Luas Wilayah) x100%	SK Bupati tentang Kawasan Kumuh Perkotaan	Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih
	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	<u>Penjelasan :</u> perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase <u>Formulasi Perhitungan :</u> (Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi / Jumlah Penduduk Seluruhnya) X 100 %	Data Rencana Induk SPAM (RISPAM)	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	<u>Penjelasan :</u> Perbandingan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak (dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase <u>Formulasi Perhitungan :</u> (Jumlah penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang terlindungi / Jumlah Penduduk Seluruhnya) X 100%	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	(Jumlah penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang terlindungi

Pamekasan, 3 Januari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN



MUHARRAM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHARRAM, ST

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Jabatan : Bupati Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

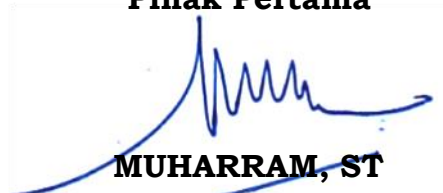
Pamekasan, 03 Januari 2023

Pihak Kedua



H. BADRUT TAMAM, S.Psi

Pihak Pertama



MUHARRAM, ST

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	90,06 %
		Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi	80 %
2.	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	97,77%
		Prosentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	21%
		Prosentase Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	57,53%
		Prosentase Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	67,65%
3.	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	Rp32.314.816.150	APBD + APBN
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp7.693.976.700	APBD + APBN
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp16.143.835.849	APBD
4.	Program Pengembangan Permukiman	Rp78.368.720.403	APBD
5.	Program Kawasan Permukiman	Rp7.469.920.000	APBD
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp9.411.130.661	APBD
7.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp18.187.407.400	APBD
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp475.000.000	APBD
9.	Program Pengembangan Perumahan	Rp1.325.000.000	APBD
10.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp7.697.500.000	APBD
11.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp159.155.500	APBD
JUMLAH		Rp179.246.462.663	APBD + APBN

Pamekasan, 03 Januari 2023

Pihak Kedua

BUPATI PAMEKASAN



H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN



MUHARRAM, ST



PERJANJIAN KINERJA PAK TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHARRAM, ST

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Pamekasan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Jabatan : Bupati Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pamekasan, 01 November 2023

Pihak Kedua

H. BADRUT TAMAM, S.Psi

Pihak Pertama

MUHARRAM, ST

PERJANJIAN KINERJA PAK TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung	95,35 %
		Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi	80 %
2.	Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	97,77%
		Prosentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	21%
		Prosentase Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	57,53%
		Prosentase Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	67,65%
3.	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A

PERJANJIAN KINERJA PAK TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	Rp35.817.794.150	APBD + APBN
2.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp11.527.100.700	APBD + APBN
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp8.833.174.087	APBD
4.	Program Pengembangan Permukiman	Rp96.818.720.403	APBD
5.	Program Kawasan Permukiman	Rp2.104.920.000	APBD
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp5.761.205.661	APBD
7.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp4.262.407.400	APBD
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp400.000.000	APBD
9.	Program Pengembangan Perumahan	Rp1.225.000.000	APBD
10.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp6.107.500.000	APBD
11.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp72.500.300	APBD
JUMLAH		Rp172.930.322.701	APBD + APBN

Pamekasan, 01 November 2023

Pihak Kedua

BUPATI PAMEKASAN


H. BADDRUT TAMAM, S.Psi

Pihak Pertama

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN


MUHARRAM, ST